
**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**Gusti Ayu Ari Andriani¹
Ni Wayan Alit Erlina Wati²**

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Tembau, Jalan Sangalangit, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur Bali
e-mail: Ayuariandriani12@gmail.com

ABSTRACT

The performance of government agencies is a form of media to report the success or failure of a government agency on the implementation of organizational goals and objectives. This study aims to see the influence variable of the Clarity of Budget Objectives and the Reporting System on the Performance Accountability of Government Agencies at Regional Apparatus Organization (ODP) Gianyar Regency. This research was conducted using a survey method with a questionnaire instrument. The number of samples studied was 132 respondents using purposive sampling technique using criteria. Data analysis techniques used in this study include descriptive analysis, validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear analysis, f test, coefficient of determination (R²) and t test.

Keywords: Clarity of budget targets, reporting systems and performance accountability of government agencies.

PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan publik pada sebuah daerah jadi perhatian bersamapeningkatan kualitas pelayanan untuk publik penting dijalankan pemerintah untuk terselenggaranya kepuasan kerja pada masyarakat. Para pejabat publikkomponen-komponen pada masyarakat sipil serta aspek bisnis sama sama mempunyai kepentingan kepada perbaikan kinerja pelayanan publik. Sebagaimana dipahami, tujuan pokok sektor publik yakni pemberian pelayanan publik bukan guna mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun hingga sekarang kita belum mengerti bagaimana sebenarnya pelayanan yang hendak didapat rakyat selaku warga negara serta seperti apa idealnya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut selaras terhadap Perpres RI No 29 Tahun 2014 mengenai SAKIP setiap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selaku bentuk tanggung jawab sebuah lembaga pemerintah guna mempertanggungjawabkan kesuksesan atau kegagalan realisasi misi organisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan serta sasaran yang sudah ditentukan lewat alat pertanggungjawaban

dengan periodik tiap akhir anggaran. Media pelaporan akuntabilitas itu yakni LAKIP serta SAKIP Senada terhadap Inpres Nomor 4 Tahun 2011, mengenai percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dibebani tugas menjalankan asistensi terhadap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah guna menambah pemahaman untuk pejabat pemerintah pusat/ daerah guna mengelola keuangan negara, menambah ketaatan kepada ketentuan undang-undang, dan menambah kualitas laporan keuangan serta tata kelola.

Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah yakni Kejelasan sasaran anggaran, yakni seberapa jauh tujuan anggaran ditentukan spesifik dengan tujuan supaya anggaran itu bisa dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab dari pencapaian sasaran anggaran tersebut, alhasil bisa memotivasi karyawan guna menjalankan yang terbaik untuk pencapaian tujuan yang hendak diraih (Yuliantidkk2014). Fungsi anggaran sektor publik diantaranya selaku sarana perencanaan, sarana pengendalian, sarana kebijaksanaan fiskal, sarana politik, sarana koordinasi serta komunikasi, sarana penilaian kinerja, sarana motivasi, serta sarana mewujudkan ruangan publik. (Mahsun & Heribertus, 2011). Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah yakni, Sistem pelaporan, menurut Hidayattullah & Irene (2015) yakni laporan yang mencerminkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan supaya bisa memantau serta mengontrol kinerja manajerial ketika melaksanakan anggaran yang sudah ditentukan. Sistem pelaporan keuangan sektor publik tersusun atas dasarnya, dasar kualitatif serta akuntansidana Bastian (2010)).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Gianyar yaitu pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) memberikan predikat "B" dengan presentase 66.60% sesuai yang diamanatkan Permen Pan RB No.12 tahun 2015 mengenai Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gianyar yang diungkap pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kemudian di evaluasi oleh Kemenpan dan RB realitanya belum seluruhnya berdasarkan ketentuan guna meraih predikat sangat baik apalagi memuaskan. Hal ini dikarenakan realisasi belanja, berarti pemerintah dipandang belum dapat melakukan penghematan untuk memanfaatkan dana masyarakat supaya bisa menciptakan keluaran yang optimal. Peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan akuntabilitas keuangan belum terselenggara seluruhnya sebab pengukuran kinerja lembaga pemerintah lebih memfokuskan terhadap kemampuan OPD untuk menggunakan anggaran.

Akuntabilitas keuangan yang disusun OPD idealnya tidak semata-mata laporan kinerja serta pertanggungjawaban realisasi anggaran yang sifatnya formalitas namun bermuatan informasi yang terpercaya untuk pemakaiannya. Oleh karena itu pemerintah musti lebih mencermati kejelasan terget anggaran instansi pemerintah yang terdapat di Kabupaten Gianyar. penilaian di sejumlah instansi atau Organisasi perangkat daerah (OPD) masih dijumpai kesalahan yakni ketidak-sesuaian antara program strategis lima tahunan serta rencana kinerja tahunan yang diprogramkan dalam penganggaran, dan indikator-indikator kinerja yang diciptakan OPD belum berorientasi hasil (<http://biroorg.baliprov.go.id/penyerahan-hasil-evaluasi-wilayah-ii/> <https://www.mennpaan.goo...id/sitee/berita-terkini/implementasi-sakip-untuk-kepentingan-masyarakat> yang di akses pada tanggal 27 Januari 2020).

Berdasarkan latar belakang yang sudah di urikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar**

Berlandaskan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar?
2. Apakah Sistem Pelaporan Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Guna mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Guna mengetahui Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan hasil penelitian yang hendak dijalankan, diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut ini.

Kegunaan Teoritis untuk mahasiswa Penelitian ini bisa memberikan gambaran serta meningkatkan pemahaman serta untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat di perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya, khususnya yang menyangkut tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Universitas Hindu Indonesia hasil penelitian ini bisa menambah kepustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan penelitian selanjutnya terhadap masalah terkait. Untuk Pemerintah Kabupaten Gianyar hasil penelitian ini harapannya bisa jadi bahan masukan untuk aparat pemerintah guna mengatasi masalah seputar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Gianyar.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *stewardship* yakni teori yang mencerminkan kondisi yang mana para manajer tidak termotivasi dari tujuan-tujuan perorangan namun lebih ditunjukkan terhadap sasaran hasil utama mereka guna kepentingan organisasi, alhasil teori tersebut memiliki pandangan psikologi serta sosiologi yang sudah dikonsepsi yang mana para eksekutif selaku *steward* termotivasi guna berbuat sesuai harapan *client*. Sisi lain, perilaku *steward* tidak bisa meninggalkan organisasinya. Hal tersebut dikarenakan *steward* berupaya meraih sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Teori *stewardship* didesain untuk para peneliti guna menguji kondisi dimana para pelaku dalam organisasi selaku *steward* bisa termotivasi guna melakukan tindakan dengan cara terbaik kepada *principal*.

Dalam pemerintahan, pemerintah berlaku sebagai *steward* dan rakyat sebagai pemiliknya. Sehingga, pemerintah selaku *steward* akan berupaya bekerja untuk kepentingan bersama, sebab *steward* merasa memiliki kepentingan bersama serta berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik adalah pertimbangan yang masuk akal. Hal tersebut dikarenakan *steward* lebih melihat pada upaya guna mencapai tujuan pemilik (kepentingan rakyat).

Teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kinerja organisasi dan kesuksesan organisasi, sehingga fungsi dari organisasi tersebut bisa optimal. Asumsi terpenting dari *stewardship* yakni *steward* meluruskan tujuan organisasi berdasarkan tujuan *principal*. *Steward* akan berperilaku sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama.

Akuntabilitas merupakan konsep etika yang dekat terhadap administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen serta lembaga yudikatif kehakimaan) yang memiliki arti, hal tersebut banyak dipakai secara persamaan dengan konsep-konsep misal bisa dipertanggungjawabkan, kapasitas memberikan jawaban, yang bisa dipersalahkan serta memiliki ketidakbebasan. Akuntabilitas secara umum bisa didefinisikan selaku permintaan pertanggungjawaban dari pemenuh tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pada pekerjaannya, auditor diharuskan bekerja dengan akuntabilitas

yang tinggi serta dengan profesional. Hal tersebut guna mencukupi permintaan klien yang menghendaki kinerja yang tinggi. (Mardiasmo 2018).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 kinerja yakni keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau sudah dicapai berkaitan dengan pemanfaatan anggaran dengan kuantitas serta kualitas yang terukur. Menurut Bastian (2006) indikator kinerja yakni ukuran kuantitatif serta kualitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian sebuah sasaran serta tujuan yang sudah ditentukan dengan mempertimbangkan indikator. Indikator-indikator yang diterapkan guna mengetahui kinerja yakni masukan, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik dalam menjadi alat ukur finansial serta nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja bisa digunakan selalu pengendalian organisasi. Ada sejumlah metode/cara pengukuran kinerja yang bisa dimanfaatkan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja tersebut pastinya diselaraskan terhadap kondisi serta kebutuhan organisasi/instansi yang mengadakan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak bisa memaksakan guna menggunakan sebuah metode pengukuran jika situasi tidak dimungkinkan serta cara/metode lainnya bisa diterapkan guna menggantikan cara/metode itu. Sejumlah cara/metode pengukuran kinerja yang bisa dinyatakan di sini diantaranya 1) membandingkan antara rencana terhadap pelaksanaannya, 2) membandingkan antara realisasi periode ini terhadap periode tahun sebelumnya, 3) membandingkan terhadap organisasi lain yang sejenis serta dinilai terbaik pada bidangnya, 4) membandingkan antara realisasi terhadap standar. Pengukuran kinerja dipakai selaku dasar guna menilai keberhasilan serta kegagalan realisasi kegiatan sesuai dengan sasaran serta tujuan yang sudah ditentukan dalam rangka merealisasikan visi serta misi lembaga pemerintah. Pengukuran dimaksud adalah hasil akan sebuah penilaian yang sistematis serta berdasarkan kelompok indikator-indikator masukan, keluaran, manfaat serta dampak (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Menurut Dedi (2008), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan instansi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, ada sejumlah karakteristik sistem penganggaran. Contoh karakteristik anggaran yakni kejelasan sasaran anggaran. Dalam aspek Pemda, sasaran anggaran meliputi rencana strategik daerah serta program pembangunan daerah. Dengan sasaran anggaran yang jelas bisa mempermudah seseorang guna membuat target-target anggaran. Kemudian target-target anggaran yang dibuat akan selaras terhadap sasaran yang hendak diraih organisasi. Menurut Emile (2004), kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jauh tujuan anggaran ditentukan dengan jelas serta spesifik supaya anggaran itu bisa dipahami pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran anggaran itu. Penentuan tujuan spesifik bisa

tambah produktif, hal tersebut bisa memotivasi karyawan guna menjalankan yang terbaik untuk pencapaian tujuan yang di inginkan alhasil berdampak pada peningkatan kinerja. Pada dokumen pembuatan anggaran daerah yang dikemukakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibuat dengan format rencana kerja serta anggaran (RKA) SKPD musti benar-benar untuk memaparkan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran dan hubungan antara jumlah anggaran (beban kerja serta harga satuan) terhadap manfaat serta hasil yang hendak diraih atau didapat masyarakat dari sebuah program yang dibuat. Abdullah (2005) mengungkapkan jika tujuan serta sasaran APBD itu musti diselaraskan terhadap lima kriteria yakni Spesifik, Terukur, Menantang tapi realistis, Memiliki batas waktu. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana anggaran akan susah untuk meimplementasikan anggaran yang ada. Hal tersebut mengakibatkan pelaksana anggaran tidak terdorong guna meraih kinerja yang diinginkan.

Sistem pelaporan yakni laporan anggaran yang merinci jenis-jenis prestasi akan anggaran berlandaskan faktor yang jadi pemicu anggaran tersebut serta unit organisasi yang bertanggung jawab untuk anggaran itu (Anthony, 2000). Sistem pelaporan adalah laporan yang mencerminkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasannya. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan supaya bisa memantau serta mengendalikan kinerja manajerial dalam menggunakan anggaran yang sudah ditentukan (Abdullah, 2005). Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan untuk memantau serta mengontrol kinerja manajer guna menjalankan anggaran yang sudah ditentukan. Pemerintah berkewajiban guna menyajikan informasi keuangan serta informasi yang lain yang hendak dipakai guna menentukan kebijakan ekonomi, sosial, serta politik oleh para pihak yang berkepentingan (Kusumaningrum, 2010). Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan, laporan yang baik yakni laporan musti dibuat dengan objektif, jujur serta transparan.

Awwaliyah Nur Azizah, Dini Widyawati (2017), hasil penelitian menunjukkan jika Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif kepada akuntabilitas kinerja badan pemerintah di OPD Kota Surabaya. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya, Sistem pelaporan berpengaruh positif kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya.

Anisa Rahmawati, Sri Rahayu (2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ((SKPD)

Kota Bandung. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Netty Herawaty (2018) Hasil penelitian menunjukkan jika kejelasan sasaran anggaran (X1), pengendalian akuntansi (X2) dan sistem pelaporan (X3) secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Fathia (2017) Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fauzan (2017) Hasil penelitian menunjukkan jika Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan serta Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fitriana et al. (2018) mendapatkan hasil jika Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran yakni seberapa jauh tujuan anggaran ditentukan dengan spesifik serta jelas untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab dari pencapaian sasaran anggaran itu. sesuai dengan keinginan principal. Sehingga diharapkan dengan adanya Berdasarkan teori stewardship pengembangan kondisi manajer yang termotivasi akan target hasil utama kepentingan organisasi tidak termotivasi dari kepentingan pribadinya, bila kedua belah pihak memiliki tujuan yang serupa maka steward akan bertindak sesuai keinginan principal. Sehingga diharapkan dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mengetahui apakah anggaran sudah sesuai rencana kerja dan anggaran OPD. Sehingga anggaran daerah musti bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mencapai kinerja yang diharapkan, sehingga anggaran daerah yang telah direncanakan bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Kejelasan sasaran anggaran memberi kemudahan bagi pegawai guna meraih kinerja yang diinginkan, dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas maka tingkat kinerja akan terwujud.

Dari penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) dan Fauzan ((2017), Awwaliyah Nur Azizah, Dini Widayawati (2017), Anisa Rahmawati, Sri Rahayu (2019), Netty Herawaty (2018) dengan hasil yang menyatakan jika kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari adanya hal tersebut maka kejelasan sasaran anggaran yang jelas bisa memudahkan guna mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan ketika melaksanakan kegiatan dan program organisasi dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk terciptanya akuntabilitas kinerja.

Sehingga bisa disusun kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah

Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Merujuk pada teori stewardship pengembangan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi tidak termotivasi dari kepentingan pribadinya, bila kedua belah pihak memiliki tujuan yang serupa maka steward akan bertindak sesuai keinginan principal. Sehingga diharapkan dengan adanya Sistem Pelaporan dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan keuangan memiliki peran penting dalam lingkungan sektor publik untuk menciptakan akuntabilitas publik. Sistem pelaporan adalah wujud pertanggungjawaban dalam memberikan informasi atas tindakan yang dilaksanakan untuk pemakaian anggaran kepada pihak internal, eksternal dan pihak berkepentingan lainnya. Tujuan dari sistem pelaporan yakni guna mengurangi tingkat ketidakpastian yang dialami oleh pengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah dan mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara positif.

Dengan adanya laporan dapat digunakan sebagai gambaran pertanggungjawaban bawahan kepada atasan sehingga dapat memudahkan dalam menggambarkan tingkat pencapaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Dari penjelasan diatas selaras terhadap penelitian yang diadakan Fitriana et al. (2018), Rio Pratama, Henri Agustin dan Rahma Taqwa (2019), Awwaliyah Nur Azizah, Dini Widyawati (2017), Netty Herawaty (2018), Fauzan (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Artinya dengan adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Sehingga dapat disusun mengenai system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yakni sebagai berikut:

H2: Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

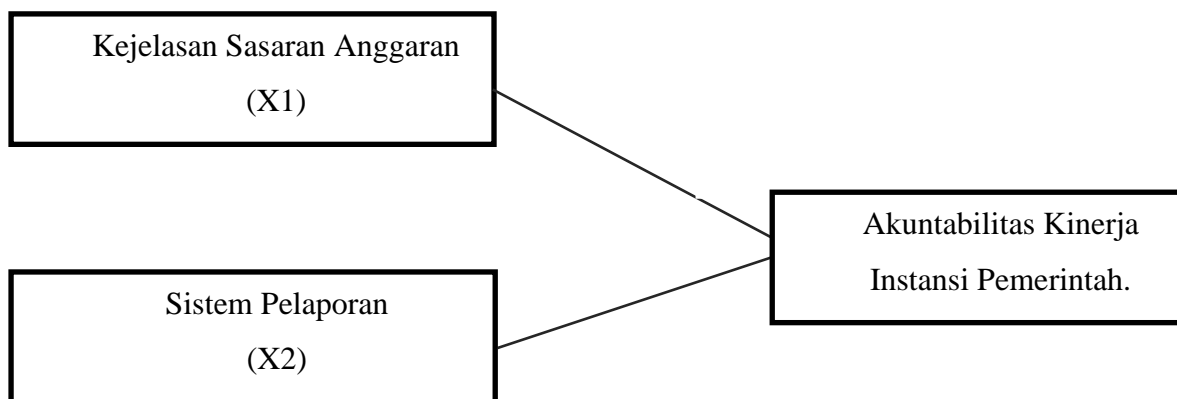
Penelitian ini memiliki tiga variabel yakni Kejelasan sasaran Anggaran, sistem pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh tujuan anggaran ditentukan dengan spesifik dengan tujuan supaya anggaran itu bisa

dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab dari pencapaian sasaran anggaran itu, alhasil bisa memotivasi karyawan guna menjalankan yang terbaik untuk pencapaian tujuan yang hendak diwujudkan (Suharono dan Solichin 2006).

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggung jawaban darii bawaahan terhadap atasann (Hidayattullah & Irene (2015). SistemPelaporan merupakan salah satu media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi (Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi oleh Kejelasan Sasaran Anggaran karena kejelasan sasaran anggaran yang jelas bisa memudahkan guna mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan ketika melaksanakan kegiatan dan program organisasi dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk terselenggaranya akuntabilitas kinerja.Sistem Pelaporanjuga berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h sebab dari penyusunan sistem pelaporan yang baik maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjaaa organisasi. Dari uraian tersebut maka desain penelitiannya seperti gambar 1

Penelitian ini dijalankan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Yang terdiri dari 35 OPD.



Gambar 1 Kerangka Berfikir

Sumber: data diolah 2021

Variabel dependen untuk penelitian yakni Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 indikator dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ialah, Akuntabilitas kejujuran serta hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan (Syahrudin Rasul 2002:11). Indikator tersebut akan diukur dengan skala likert. Variabel independen untuk penelitian ini yakni Kejelasan Sasaran Anggaran(X1).Terdapat

indikator dalam Kejelasan Sasaran Anggaran yakni, Kejelasan Rencana kerja dan Anggaran, Kesesuaian Rencana Kerja serta Anggaran dengan RAPBD, Sasaran Anggaran Jelas serta Spesifik, Keahlian serta pengetahuan, Faktor yang menunjang tujuan instansi, Ketepatan Anggaran terhadap realisasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dengan efektif serta tahun anggaran selaku harapan serta evaluasi kinerja instansi (Kenis 1979 dalam Anjarwati 2012). Indikator tersebut akan diukur dengan skala likert.

Sistem Pelaporan (X2). Terdapat indikator dalam system pelaporan yakni, Penyajian laporan keuangan dengan lengkap, Informasi pada laporan keuangan dipakai selaku sarana koreksi, informasi keuangan diberikan guna mencukupi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus, laporan keuangan bisa diuji serta informasi keuangan bisa dimengerti oleh pemakai serta dibandingkan terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. (Mardiasmo 2002 dalam Anjarwati 2012). Indikator tersebut akan diukur dengan skala likert.

Populasi pada penelitian ini yakni Aparatur Sipil Negara yang bekerja di OPD Kabupaten Gianyar. Dengan jumlah ASN sebanyak 2.751. Metode penentuan sampel untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Kriteria pengambilan sampelnya yaitu : Menduduki jabatan minimal 1 tahun, Menduduki jabatan sebagai Kepala OPD, Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan dan Kasubag Keuangan Alasan pemilihan sampel tersebut karena yang bersangkutan dianggap mampu untuk menggambarkan keseluruhan kinerja instansi pemerintah daerah Kab. Gianyar.

Table 1. Rincian Proses Pengambilan Sampel

KRITERIA	JUMLAH
O	
Jumlah seluruh ASN yang bekerja di OPD Kabupaten Gianyar.	2.751
Jumlah ASN yang tidak memenuhi kriteria sampel yang diperlukan	(2.619)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	132

Sumber: data diolah 2021

Tenik analisis yang dipakai untuk penelitian ini yakni analisis regresi linear berganda, teknik itu dipakai guna mendapat gambaran tentang Kejelasan Sasaran Anggaran serta Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memanfaatkan bantuan program

SPSS for windows. Sugiyono (2014). Pengujian regresi linier berganda dimulai dari uji statistik deskriptif serta diteruskan terhadap uji asumsi klasik yang tersusun atas uji normalitas uji multikolinieritas uji heteroskedastisitas, menggunakan uji kelayakan model (uji F), uji koefisien determinasi (R^2) serta uji hipotesis (uji t).

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan yaitu:

$$\bar{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Penjelasan:

\bar{Y} : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

α : Nilai intersep (konstan)

β_1 - β_3 : Koefisien arah regresi

X_1 : Kejelasan Sasaran Anggaran

X_2 : Sistem Pelaporan

e : error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan dengan memberikan kuisioner ke 35 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Kuisioner yang disebar untuk responden yakni 132 kuisioner serta semua kuisioner dikembalikan oleh responden. Berlandaskan data yang dipaparkan dapat dipahami responden berusia 33-40 tahun yaitu 20 orang, berusia 41-48 tahun yaitu 48 orang, berusia 49-56 tahun yaitu 56 orang dan yang berusia 57-60 tahun yaitu 8 orang. Responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 54 orang, serta perempuan yaitu 78 orang. Responden dengan masa kerja 1-10 tahun yaitu 132 orang. Responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 92 orang, dan S2 40 orang.

Berlandaskan data yang dipaparkan dalam lampiran 5 Responden yang memangku jabatan selaku kepala OPD sejumlah 35 orang, selaku Kasubag Umum sejumlah 35 orang serta selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan sejumlah 62 orang.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sasaran	132	30.00	40.00	34.4167	2.69872
Sistem	132	18.00	25.00	21.3409	1.91351
Akuntabilitas	132	23.00	30.00	26.9848	2.40542
Valid N (listwise)	132				

Sumber : data diolah 2021

Tabel 1 analisis statistik deskriptif digunakan menjelaskan nilai minimal, maksimal, rata-rata serta standar deviasi.

Tabel 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Kelompok	NomorItem	Validitaas				Probaabilita s (p)	Reliabilitas Koeffisien Alpha
		Korelaasi (r)					
X₁	X₁₁ – X₁₈	0,649	0,649	0,718	0,739	0,000	0,818
		0,741	0,781	0,785	0,787		
X₂	X₂₁-X₂₅	0,771	0,796	0,818	0,844	0,000	0,824
		0,846					
Y	Y₁₁-Y₁₆	0,632	0,730	0,785	0,823	0,000	0,873
		0,828	0,838				

Sumber : data diolah 2021

Berlandaskan tabel 3, semua variable mempunyai nilai korelasi diatas 0,30 serta koefisien alpha diatas 0,70 alhasil bisa diambil kesimpulan valid serta reliable. Instrumen penelitian sudah baik serta bisa diteruskan guna analisis selanjutnya.

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Heterokedastisitas
	(sig. 2 tailed)	Tolerance	VIF	(sig. 2 tailed-Abres)
X1		.595	1679	.316
X2	0.097	.595	1679	.100

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan table diatas nilai sig 0,097 lebih besar dari 0,05 alhasil bisa diambil kesimpulan jika nilai residual atau model regresi berdistribusi normal.

Berdasarkan Tabel diatas, semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10, kemudian bisa diambil simpulan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil uji yang disajikan pada tabel 4.3 nampak jika variabel bebas mempunyai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau sejumlah X1= 0.316, X2= 0.100, alhasil bisa diambil kesimpulan jika model regresi yang dipakai untuk penelitian ini tidak mempunyai Heterokedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda, adalah teknik yang dipakai guna memperoleh gambaran tentang Kejelasan Sasaran Anggaran serta Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 5. Tabulasi Output SPSS

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Probabilitas (sig.)	Keterangan
Konstanta	7.722	3.431	.001	
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	.321	3.545	.001	Signifikan

Sistem Pelaporan (X ₂)	.351	3.872	.000	Signifikan
Adjusted R Square	0.360			
F Statistik	37.801			
Probabilitas (p-value)	0.000			
Variabel Dependen	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan table diatas, bisa dituliskan fungsi regresi dibawah ini:

$$Y = 7.722 + 0.321X_1 + 0.351X_2 + e$$

Koefisien Determinasi (Adjusted R²) mengacu pada tabel diatas Nilai adjusted R square yakni 0.360 menyatakan jika 36% variasi nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bisa diterangkan oleh faktor-faktor Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan. Sementara lainnya yakni 64% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati pada penelitian ini.

Uji Signifikasi Nilai F mengacu pada Tabel Hasil pengujian p-value mendapatkan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan dengan bersama-sama berpengaruh signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi < 0,05, maka Hipotesis diterima. Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji t dijelaskan sebagai berikut: Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai nilai t_{hitung} yakni 3,545 dengan nilai signifikansi yakni $0,001 < 0,05$ berarti Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Variabel Sistem Pelaporan memiliki nilai t_{hitung} yaitu 3872 yang nilai signifikasinya $0,000 < 0,05$ maknanya, Sistem Pelaporan mempunyai pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah**

Berlandaskan nilai koefisien regresi yakni 0,321 serta nilai t_{hitung} pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 3,545 dengan nilai Signifikansi (sig.) yakni $0.001 < 0.05$ Hasil tersebut menyatakan jika Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki dampak positif kepada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran bisa memotivasi pegawai guna meraih kinerja yang diinginkan, yang mana dengan memahami sasaran anggaran tingkat kinerja bisa diwujudkan. Pencapaian kinerja ini hendak berhubungan terhadap motivasi, yang mana hal tersebut diakibatkan dengan motivasi yang tinggi bisa memotivasi pegawai guna meraih kinerja yang diinginkan, adanya sasaran anggaran yang jelas, maka bisa memudahkan guna mempertanggungjawabkan kesuksesan atau kegagalan penyelenggaraan tugas organisasi pada rangka mewujudkan tujuan serta sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada OPD kabupaten Gianyar sudah mengalami peningkatan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang dimana pada tahun 2014 masih dengan predikat C dengan presentase 40, 90% dan pada tahun 2019 sudah dengan predikat B dengan presentase 66.60 % hal tersebut menunjukkan jika bertambah jelas sasaran anggaran, maka bisa menaikkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerimaan hipotesis tersebut pun dikuatkan dari sejumlah hasil penelitian diantaranya: Fauzan (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Awwaliyah Nur Azizah, Dini Widyawati (2017), hasil penelitian menunjukkan jika Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif kepada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Berdasarkan nilai koefisien regresi yaitu 0.351 serta nilai t_{hitung} pada variabel Sistem Pelaporan sebesar 3.872 dengan nilai Signifikansi (sig.) yakni $0.000 < 0.05$ Hasil tersebut menyatakan jika Sistem Pelaporan memiliki nilai positif. Dari sistem pengelolaan keuangan daerah mencakup sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sistem pelaporan akan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan supaya bisa memantau serta mengontrol kinerja manajerial untuk menerapkan anggaran yang sudah ditentukan. Pada OPD Kabupaten Gianyar telah mengalami peningkatan kinerja instansi pemerintah yang dimana pada tahun 2019 sudah dengan Predikat B. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di OPD Kabupaten Gianyar sudah bekerja dengan Baik

untuk mendapatkan hasil yg maksimal. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik Sistem Pelaporan maka dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerimaan hipotesis ini pun diperkuat dari sejumlah hasil penelitian diantaranya Fauzan (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh positif kepada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fitriana et al. (2018) menunjukkan hasil jika Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada pembahasan analisis data dengan pembuktian kepada hipotesis, maka kesimpulan yang bisa ditarik yaitu:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai nilai koefisien regresi yakni 0.321 dan nilai sig yakni $0.001 < 0.05$ artinya Kejelasan sasaran Anggaran berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bertambah tinggi kejelasan sasaran anggaran maka bertambah baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Sistem Pelaporan mempunyai nilai koefisien regresi yakni 0.351 dan nilai sig yakni $0.000 < 0.05$ artinya sistem pelaporan berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bertambah baik sistem pelaporan maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dijalankan maka terdapat sejumlah saran yang bisa diberikan peneliti diantaranya:

1. Peneliti berikutnya idealnya memperluas objek penelitian, tidak hanya di OPD Kabupaten Gianyar tetapi dengan memperluas ruang lingkup provinsi. Diharapkan juga menggunakan metode lain untuk memperoleh data.
2. Untuk peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti pengendalian akuntansi dan kualitas sumber daya manusia yang bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan bisa meningkatkan total sampel pada penelitian supaya data yang didapat tambah akurat.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Gianyar agar meningkatkan segala aspek yang bisa mempengaruhi kinerja instansi pemerintah dengan meningkatkan kejelasan sasaran

anggaran serta sistem pelaporan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau sesuai perundang – undangan yang terbaru agar tidak ada penurunan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2005). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan system pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada Kabupaten dan Kota di daerah istimewa Yogyakarta). *KOMPAK*.13,37-67
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap kauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 28-48.
- Anthony,RN.,Dearden, dan Bedford. 2000. *System Pengendalian Manajemen*. Edisi V. Erlangga, Jakarta.2000
- Auditya, L. dan Husaini, L. (2013). Analisis Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Awwaliyah Nur Azizah, Widyawati Dini (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gianyar 2020
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Chintya. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok. Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Dedi (2008).Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah dengan Motivasi Kerja dan *Internal Locus Of Control* sebagai Variabel Moderating.
- Donaldson, L., dan Davis, JH1991. **Stewardshiptheoryoragencytheory:CEO governanceanshareholderreturn**. *Australiajournalofmanagement*,16: 49-64.
- Emile, (2004) . Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi, *Simponisum Nasional Akuntansi VII desember*,603-646.
- Fathia (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Fauzan (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Febrianti Reni, Feblin Anis, Ainin Hasiatul (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Universitas Baturaja.
- Fitriana et al. (2018) melakukan penelitian tentang Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
- Ghozali, Imam. 2011. “ *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”, Semarang,
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Haspiarti. (2012). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kota Parepare). Skripsi. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Herawaty, N. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Simposium Nasional Akuntansi Vol.13. Jambi.
- Hidayatullah, A. dan Herdjiono, I. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. Prosiding. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank.
- Hidayatullah, A., Irene, I. (2015) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke.
- <http://biroorg.baliprov.go.id/penyerahan-hasil-evaluasi-sakip-wilayah-ii/>
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/implementasi-sakip-untuk-kepentingan-masyarakat>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Kenis, I. (1979), “ *Effects of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*”, *The Accounting, Review*.
- Kusumaningrum, Indraswati. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, pengendalian akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis Universitas Diponegoro.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Mahsun dan Heribertus, 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi ketiga*. BPFE: Yogyakarta.

-
- Mardiasmo, M (2002). Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo,M. (2018). Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta
- Nuraini, Dian Indu Dewi.2012 “ *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Brebes*”. **SIJALU**, ISSN 1412-5331 Vol.11 No.4. Hal 63-77
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1
- Pudiklatwas BPKP, 2017
- Pratama Rio, Agustin henri, Taqwa salma (2019), Pengaruh pengendalian akuntansi,system pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Alumni jursan akuntansi Fakultas Ekonomi Negeri Padang. (*Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri D, Februari 2019, Hal 429-444.*)
- Rahmawati Anisa, Rahayu Sri (2019). Pengaruh Kejelasann Sasarann Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitass Kinerja Instansii Pemerintah (study kasus aa SKPD di kota Bandung tahun 2018).
- Sugiono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suhartono dan Solichin. (Agustus 2006). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi. Symposium Nasional Akuntansi 9 Padangg, 23-26.
- Syahrudin Rasul.2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran* . Jakarta : Detail Rekod.
- Yulianti,R.,Hardi,H., & Rusli,R.(2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Kesulitan sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi pada SKPD Kabupaten palalawan. JOM (*jurnal online mahasiswa*) *fakultas Ekonomi*,1(2),1-5

www.baliprov.go.id tanggal akses 27 januari 2020

www.gianyarkab.go.id tanggal akses 2 Desember 2020